

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013-2015)**



Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strara I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

YOGA DIAZ RISCHI DANIESWARA

B 200130396

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013-2015)**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

YOGA DIAZ RISCHI DANIESWARA

B200130396

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Fatchan Achyani, SE, MSi

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013-2015)**

OLEH

YOGA DIAZ RISCHI DANIESWARA

B200130396

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari 14 Oktober 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
(Sekretaris Dewan Penguji)**
- 3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Anggota Dewan Penguji)**


(.....)

(.....)

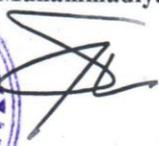
(.....)

Mengatahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



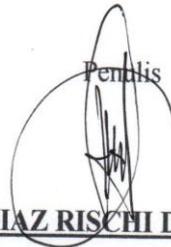

Dr. Svamsudin, M.M.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Oktober 2017

Penulis


YOGA DIAZ RISCHI DANIESWARA

B 200130396

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013-2015)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Pada provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2015.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan variabel PDRB dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2013 -2015. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Bagi Hasil (DBH) dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : *PAD,DAU, DAK, DBH*, Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of Local Revenue, General Allocation Funds,Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds to capital expenditure distric on Province of Central Java from 2013 to 2015.

The type of data in this research is secondary data which collected from the report document realization of Local Government Revenues and Expenditures (APBD) district or urban on Province of Central Java and variable of PDRB from Statistic Indonesia (BPS) of Central Java from 2013 to 2015. The population in this research is all the distric or urban on Province of Central Java and the research sample was determined by the method of purposive sampling.

The result of this research shows that The Local Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds has influence to capital expenditure distric, but The Profit Sharing Funds and local economic growth has no influence to capital expenditure distric.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Funds,Special Allocation Funds,Profit Sharing Funds, capital expenditure, Economic Growth*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999 mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan/pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas Pe 1 atan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan dari daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Nuarisa, 2013).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengurangi campur tangan

pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD (Pangestu, 2014).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah (Sudarwadi, 2015).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah

dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Sudarwadi, 2015).

Pada dasarnya penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan adalah *NonProbability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*. Sampel dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2015. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2013-2015. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik, Analisa Linier Berganda dengan pengujian Hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

| Variabel | Kolmogorov – Smirrov | <i>p-value</i> | Keterangan |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| <i>Unstandardized Residual</i> | 0,691 | 0,726 | Data terdistribusi Normal |

Sumber : Data diolah 2017

Dari hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa tabel 1 nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 0,687 | 1,456 | Bebas multikolinearitas |
| Dana Alokasi Umum | 0,372 | 2,686 | Bebas multikolinearitas |
| Dana Alokasi Khusus | 0,500 | 2,001 | Bebas multikolinearitas |

| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------------------------|
| Dana Bagi Hasil | 0,662 | 1,512 | Bebas multikolinearitas |
| Pertumbuhan Ekonomi | 0,991 | 1,009 | Bebas multikolinearitas |

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen, masing-masing memiliki nilai VIF berada < 10 , demikian juga hasil nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | <i>p-value</i> | <i>sig</i> | Keterangan |
|------------------------|----------------|------------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 0,843 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Dana Alokasi Umum | 0,723 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Dana Alokasi Khusus | 0,846 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Dana Bagi Hasil | 0,978 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Pertumbuhan Ekonomi | 0,716 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 3 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

| uji <i>Durbin-Watson</i> | |
|--------------------------|--------------------|
| du | 1,768 |
| DW | 2,046 |
| 4-du | 2,232 |
| Keterangan | Bebas Autokorelasi |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4 tersebut terlihat bahwa nilai DW terletak antara du dan 4-du ($1,768 < 2,046 < 2,232$), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak terjadi autokorelasi.

3.2 Hasil Pengujian Hipotesis

3.2.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | t_{hitung} | p-value |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Konstanta | 70371.279 | 1.296 | 0.201 |
| Pendapatan Asli Daerah | 0.331 | 4.343 | 0.000 |
| Dana Alokasi Umum | 0.097 | 2.817 | 0.007 |
| Dana Alokasi Khusus | 0.990 | 3.901 | 0.000 |
| Dana Bagi Hasil | 0.005 | 0.346 | 0.731 |
| Pertumbuhan Ekonomi | -11491.477 | -1.239 | 0.221 |
| R ² | = 0,746 | F _{hitung} | = 28,236 |
| Adjusted R ² | = 0,720 | Sig | =0,000 |

Sumber: Data diolah 2017

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

Nilai konstanta sebesar 70371,279. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan pertumbuhan ekonomi (PE) diasumsikan bernilai nol atau konstan maka belanja modal (BM) akan mengalami peningkatan sebesar 70371,279.

Besarnya nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,331 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% maka belanja modal (BM) akan meningkat sebesar 0,331 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Besarnya nilai koefisien variabel dana alokasi umum (DAU) sebesar 0,097 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan dana alokasi umum sebesar 1% maka belanja modal (BM) akan meningkat sebesar 0,097 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Besarnya nilai koefisien variabel dana alokasi khusus (DAK) sebesar 0,990 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1% maka belanja modal (BM) akan meningkat sebesar 0,990 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Besarnya nilai koefisien variabel dana bagi hasil (DBH) sebesar 0,005 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan

dana bagi hasil sebesar 1% maka belanja modal (BM) akan meningkat sebesar 0,005 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Besarnya nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar -11491.477 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka belanja modal (BM) akan menurun sebesar 11491.477 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3.2.2 Uji Ketepatan Model (*Goodness of fit*)

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, yang dapat dilihat pada table IV.7 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $28,236 > 2,618$ dan nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan model regresi yang *goodness of fit*, yang artinya bahwa model penelitian baik dan dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis.

Untuk hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R²* sebesar 0,720 Hal ini berarti bahwa 72,0% variasi variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variable pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya yaitu 28,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | t_{hitung} | t_{tabel} | <i>p-value</i> | Keterangan |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|
| Pedapatan Asli Daerah | 4.343 | 2,024 | 0.000 | Signifikan |
| Dana Alokasi Umum | 2.817 | 2,024 | 0.007 | Signifikan |
| Dana Alokasi Khusus | 3.901 | 2,024 | 0.000 | Signifikan |
| Dana Bagi Hasil | 0.346 | 2,024 | 0.731 | Tidak signifikan |
| Pertumbuhan Ekonomi | -1.239 | -2,024 | 0.221 | Tidak signifikan |

Sumber: data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengujian uji t di atas, dapat dijelaskan bahwa:

Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t_{hitung} (4,343) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,024) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000

$< \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H₁ diterima**, sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Variabel dana alokasi umum memiliki nilai t_{hitung} (2,817) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,024) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,007 $< \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H₂ diterima**, artinya bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai t_{hitung} (3,901) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,024) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 $< \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H₃ diterima**, artinya bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Variabel dana bagi hasil memiliki nilai t_{hitung} (0,346) lebih kecil dari pada t_{tabel} (2,024) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,731 $> \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H₄ ditolak**, artinya bahwa variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t_{hitung} (-1,239) lebih kecil dari pada t_{tabel} (2,024) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,221 $> \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H₅ ditolak**, artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH)) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap belanja modal (BM). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Hasil penelitian pada model regresi variabel pendapatan asli daerah mempunyai koefisien 0,331.

Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,007. Hasil penelitian pada model regresi variabel dana bagi hasil mempunyai koefisien 0,097.

Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Hasil penelitian pada model regresi variabel dana alokasi umum mempunyai koefisien 0,990.

Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,005. Hasil penelitian pada model regresi variabel dana alokasi umum mempunyai koefisien 0,731.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan nilai signifikan 0,221 Hasil penelitian pada model regresi variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien -11491,477.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas penelitian berikut. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

Menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama. Untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengambilan sampel lainnya, sehingga data yang diteliti lebih luas dan hasil yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, Achmad David. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal. *Journal Riset Mahasiswa.(JRMx)*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
- Idris, Seni Fitriani. 2012. Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan Dan Persepsi Etis Terhadap Audit Judgment (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nuarisa, Sheila Ardhan. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.

- Pangestu, IA, Arifati R dan Oemar, A. 2014. “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi empiris pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2013)”.
- Pangestu, IA, Arifati R dan Oemar, A. 2014. “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi empiris pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2013)”.
- Sudarwadi, Hustianto. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2014).*SNEMA-2015*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.